

## KONTRA PROPAGANDA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM MENANGGULANGI PERKEMBANGAN RADIKALISME DI INDONESIA

Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam<sup>1</sup>, Khoirul Hasan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan. Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan. Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 Indonesia.

\*Email: [bambang.wiji@idu.ac.id](mailto:bambang.wiji@idu.ac.id), Telp: +628121110152

### Abstrak

Kajian ini terkait masalah kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi propaganda penyebaran paham radikal yang saat ini terjadi. Kandungan isi propaganda yang mengarah kepada perkembangan radikalisme sampai saat ini, secara luas dan terus menerus berlangsung baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah dari BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme) melalui teknik kontra propaganda melawan perkembangan radikalisme, terutama yang mengarah kepada aksi terorisme. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori perkembangan radikalisme di Indonesia oleh Vedi Hadiz dan teori komunikasi oleh Hafied Cangara. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontra propaganda yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki tujuan yang jelas terkait penanggulangan radikalisme di Indonesia. Berbagai sarana prasarana berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat online maupun offline, telah dimanfaatkan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan wawasan perdamaian dan kebangsaan. Saran dari penelitian ini untuk dilanjutkan lagi sebagai penelitian lanjutan terkait perkembangan radikalisme di Indonesia.

**Kata Kunci:** Strategi, Kontra Propaganda, Radikalisme, Media Sosial

### Abstract

*This study analyzes the counter-propaganda problem of the National Counter Terrorism Agency in overcoming the propaganda of the spread of radicalism that is currently happening. The content of propaganda which leads to the development of radicalism, is widely and continuously taking place both through social media and other communication media. Therefore, it is very important to identify various obstacles faced by the BNPT (National Counter Terrorism Agency) in counter-propaganda against the development of radicalism, especially those that lead to acts of terrorism. The theory used as a knife of analysis is a theory about the development of radicalism in Indonesia by Vedi Hadiz and the theory of communication by Hafied Cangara. The methodology of this study uses qualitative through descriptions. The results of this study found that counter-propaganda strategies carried out by the National Counterterrorism Agency had clear objectives related to counter-radicalism in Indonesia. Various infrastructure facilities in the form of mass media channels that exist both online and offline, have been utilized by the BNPT through the Peace Media Center to spread the insights of peace and nationality. Recommendation of this research to be continue for identification of radicalitation movement in Indonesia..*

**Keywords:** Strategy, Counter-Propaganda, Radicalism, Social Media.

## Pendahuluan

Sejak 2002, Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan yaitu bom Bali pertama pada 2002, serangan bom di Hotel J.W Marriott pada 2003, Bom Kedutaan Australia pada 2004, bom Bali kedua pada 2005, serta serangan simultan bom di Hotel J.W Marriot serta Ritz-Carlton pada 2009. Akibat serangan tersebut ratusan orang tewas serta ratusan lainnya terluka. Dari beberapa aksi terorisme tersebut, yang terbesar dari segi jumlah korban dan pemberitaan internasional adalah bom Bali I dan II, bom di hotel Marriot, Kedutaan Australia, pasar Tentena, Poso, Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 juli 2009. Kemudian, setelah dibentuk BNPT pada tahun 2010, beberapa rentetan aksi terorisme masih terus terjadi sehingga menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat dan keamanan negara. Di antaranya adalah Bom Kalimantan 2010, Bom Masjid Cirebon 2011, Bom Gereja Solo 2011, Bom Mapolres Poso 2013, Bom Sarinah 2016, dan yang terbaru Bom Kampung Melayu 2017. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pada tahun tahun 2016 terjadi 170 kasus terorisme yang naik secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 82 kasus.

Berbagai aksi terror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarjinalkan, teralienasi, dan putus asa.

Dalam menekan munculnya gerakan-gerakan tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Kemudian diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tahun 2010 pemerintah

mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002.

Akan tetapi, menurut survey dari lembaga Alvara *Research Center* dan Mata Air *Foundation* ditemukan bahwa adanya fenomena peningkatan pemahaman ideologi yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila di dalam masyarakat dimana data tersebut menunjukkan bahwa upaya dari pihak kelompok yang menginginkan adanya perubahan pembaruan sosial dan politik dengan cara apapun merupakan fenomena ancaman nyata yang terjadi saat ini di Indonesia. Data tersebut menunjukkan terdapat 23,4% pendapat yang menyatakan mahasiswa setuju dengan tegaknya negara Islam atau khilafah, 23,1% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 6,7% Pegawai BUMN tidak setuju dengan ideology Pancasila, serta 0,1% berindikasi tidak setuju dengan Pancasila. Salah satu penyebab peningkatan pemahaman yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila tersebut disinyalir tidak terlepas dari berbagai usaha propaganda kelompok radikal untuk membentuk suatu jaringan baru dan mengarah secara langsung kepada masyarakat menggunakan berbagai media yang ada termasuk salah satunya adalah media sosial secara *online*.

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sampai dengan 26 Juni 2018 telah ditemukan sebanyak 5526 konten propaganda yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Temuan tersebut diantaranya melalui Situs/ Forum/ File sharing sebesar 614, Facebook dan Instagram sebanyak 2986, Youtube dan Google Drive 552, Telegram 502, dan yang terakhir adalah Twitter sebanyak 872. Hal ini

menunjukkan bahwa pengguna media sosial saat ini menjadi kelompok yang rentan untuk terprovokasi oleh berbagai konten propaganda yang muncul di laman tersebut.

Kandungan isi propaganda yang mengarah kepada perkembangan radikalisme sampai saat ini, secara luas dan terus menerus berlangsung melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya. Pelaksanaan strategi kontra propaganda oleh BNPT yang sementara ini berlangsung masih belum optimal dalam melawan propaganda kelompok radikal. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa propaganda radikalisme kontemporer yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan ideologi yang mereka yakini untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara telah cukup berhasil dalam mempengaruhi hati dan pikiran masyarakat Indonesia.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa proses kontra radikal termasuk kontra propaganda yang sementara ini berlangsung setelah terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme, belum terlaksana secara optimal dalam menekan penyebaran paham radikal yang saat ini terjadi atau dengan kata lain proses radikalisasi lebih cepat daripada proses deradikalisasi yang sementara berlangsung. Pihak kelompok radikal akan selalu berusaha untuk mendapatkan kendali pengaruh atas masyarakat untuk menolak nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Apabila hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi gangguan nyata bagi stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan berbagai gambaran dan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk membuat kajian kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana kontra propaganda dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia yang dilakukan oleh BNPT.

### Metodologi Penelitian

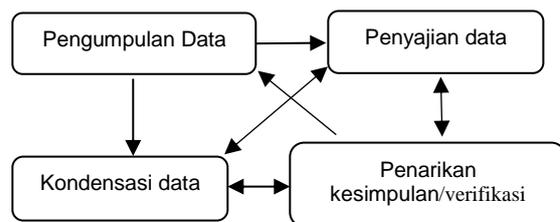
Penelitian tentang kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Peneliti berharap dapat menghasilkan sebuah deskripsi

yang mendalam dari temuan penelitian dengan bahasa yang lebih dapat dipahami oleh semua pihak, baik dari kalangan pemerhati ilmu sosial sendiri maupun masyarakat awam.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah berbagai informan yang menjadi subyek penelitian sehingga didapatkan beberapa data primer. Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen penting dan mendukung penelitian seperti dokumentasi.

Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah analisis seperti gambar di bawah ini:



Gambar: Analisa Data Model Interactive Miles, Huberman dan Saldana, 2014

### Pembahasan

Tujuan dari pembahasan adalah untuk mendapatkan hasil analisa serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. peneliti berusaha untuk bersikap obyektif terkait permasalahan yang didapatkan dan memberikan pemahaman serta penjelasan kepada pembaca mengenai kejadian faktual dan interpretasi analisis hasil yang didapatkan di lapangan tanpa adanya unsur subyektifitas dari peneliti.

### **Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan BNPT dan segenap jajaran termasuk instansi lainnya, dibutuhkan suatu strategi yang tepat guna menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dianggap sebagai suatu seni untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai langkah yang telah dibuat agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: Ends, Means, dan Ways.

**Pertama, Ends** atau tujuan. Berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan oleh peneliti dari BNPT, telah ditetapkan tujuan (*ends*) dari kontra propaganda yang dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi pola penyebaran propaganda kelompok radikal, mencegah penyebaran propaganda radikal di tengah masyarakat, membentengi masyarakat dengan kontra narasi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat, serta meningkatkan *awareness* masyarakat agar mampu menangkal dan melawan propaganda dari kelompok radikal dimana hal tersebut juga sudah tertera di dalam *Blueprint* Pencegahan Terorisme yang saat ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas BNPT. Mengacu kepada teori strategi dari Mintzberg dimana strategi sebagai sebuah perencanaan (*plan*) untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa kontra propaganda BNPT yang saat ini dilaksanakan telah memiliki tujuan dan perencanaan yang jelas. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah strategi yang ada harus mampu menjadi pedoman dalam pengembangan taktik pelaksanaan (*Ploy*) dimana sesuai dengan teori strategi Mintzberg yang menyatakan bahwa strategi

merupakan acuan taktik yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

Sebagai sebuah perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah membuat perencanaan strategi kontra propaganda yang dituangkan dalam suatu rencana strategis tahun 2010-2014 dan diperbaharui 2015-2019. Perencanaan yang dilakukan BNPT dengan melakukan kontra propaganda terhadap propaganda kelompok radikal, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh adanya propaganda yang disebar (pencegahan dalam artian peningkatan imunitas masyarakat dari paparan paham radikal).

Maka dapat dilihat bahwa aspek *ends* (tujuan) yang ada di dalam program kontra propaganda BNPT dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia dapat dinilai sebagai sebuah perencanaan yang baik dimana tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi tersebut dapat memperjelas arah yang harus ditempuh oleh BNPT dalam melaksanakan tugasnya.

**Kedua, means** atau sarana prasarana, pada dasarnya sarana prasarana digunakan untuk mendukung pelaksanaan kontra propaganda yang bersifat *online* dan *off line*. Teknologi yang dimiliki digunakan dalam rangka melakukan filterisasi data berdasarkan wilayah (Indonesia), Media Online, Media Sosial, Forum Diskusi yang pada prinsipnya bersifat *on line*. Setelah teridentifikasi maka sumber media yang terindikasi memiliki nuansa propaganda dari pihak kelompok radikal kemudian dilaporkan kepada pihak kemenkominfo untuk proses *take down*.

Dari segi offline, sebagaimana diketahui bahwa kelompok radikal masih menggunakan sarana yang lama seperti penyebaran propaganda melalui buku cetak, bulletin, lembaga pendidikan dan berbagai kegiatan di majlis taklim. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada pihak aparat keamanan kewilayahan dimana dalam hal ini pihak kepolisian, guna penanganan

secara hukum lebih lanjut. Selain itu, menurut informan (I1), pemberdayaan aparat kewilayahan baik dari TNI maupun Polri juga menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pihak BNPT karena sangat efektif dalam mengidentifikasi berbagai bentuk propaganda *offline* dari pihak kelompok radikal sehingga pada akhirnya penanganan yang dilakukan dapat segera terlaksana.

Berbagai saluran media massa yang ada baik yang bersifat *online* maupun *offline*, digunakan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan berbagai berita positif guna mempengaruhi masyarakat agar tidak terpengaruh berbagai bentuk ajakan yang dipropagandakan oleh pihak kelompok radikal. Sesuai dengan informasi yang diterima dari Direktur Pengelolaan Media kemenkominfo, pihak kemenkominfo yang juga merupakan mitra kerjasama dari BNPT dalam penanggulangan propaganda kelompok radikal juga turut membuat berbagai pemberitaan positif tentang pelaksanaan berbagai program pemerintah maupun juga yang berisikan tentang berbagai hal terkait nilai-nilai kebangsaan. Seluruh saluran media yang ada dibanjiri dengan berbagai pemberitaan positif dengan maksud untuk mempersempit ruang gerak dari saluran yang digunakan oleh pihak kelompok radikal.

Berbagai undang-undang yang ada baik UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No.19/ 2016 dan UU No.5/ 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada dasarnya telah memberikan dasar legalitas yang kuat untuk pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap berbagai saluran media yang ada. Namun satu hal yang harus diantisipasi adalah adanya berbagai perkembangan di dalam teknologi komunikasi dan informatika yang pada dasarnya selalu terus berubah dan berkembang secara dinamis. Aspek sarana prasarana dalam strategi kontra propaganda dari pihak BNPT harus dapat mengimbangi dinamika tersebut mengingat pihak kelompok radikal juga selalu mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang terjadi serta menggunakannya untuk tujuan yang telah mereka tetapkan.

Berdasarkan pada hasil identifikasi atas saluran media yang digunakan oleh pihak kelompok radikal, pihak BNPT telah menjalankan program *media literacy* yang bersifat *offline* maupun *online* yang terintegrasi

bersama para pemangku kepentingan dengan menggunakan berbagai saluran media baik berbentuk digital, elektronik, penyiaran, cetak maupun konvensional seperti kegiatan dialog dan *workshop* dalam rangka penanggulangan perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia.

**Ketiga, Ways** atau Cara atau metode, penanganan masalah indoktrinasi terlebih terkait dengan radikalisme tidak hanya dapat dilawan melalui strategi *hard approach* dari BNPT, akan tetapi penanganan masalah radikalisme juga harus ditangani dengan penanganan *soft approach*. Dalam pelaksanaan kontra propaganda, BNPT menggunakan dua metode, yaitu metode *online* dan metode *offline* dengan konten utama dalam strategi kontra propaganda Pusat Media Damai adalah berupa penyebaran wawasan perdamaian dan kebangsaan.

Metode *offline* yang dilakukan oleh dengan mengadakan seminar-seminar, melaksanakan kegiatan penguatan koordinasi dengan K/ L, peran aktif komunitas blogger, membangun jejaring komunitas, melakukan pelatihan internet damai terhadap generasi muda, dan pelibatan ulama dan tokoh agama dalam kampanye damai di dunia maya. Selain itu juga meluncurkan buku-buku yang didistribusikan secara gratis dan berisikan informasi tentang terorisme. Sedangkan secara online kegiatan yang telah dilakukan adalah monitoring media online (situs/ sosmed), pemberdayaan media Informatif, pemberdayaan media edukatif, pemberdayaan portal komunitas damai, mensinergikan seluruh jejaring komunitas damai dalam mewujudkan program damai di dunia maya. Selain itu guna mengantisipasi adanya fenomena propaganda yang diduga masuk melalui berbagai materi pembelajaran anak sekolah maka dilakukan kerjasama dengan pihak Kementerian pendidikan nasional dan Kemenristekdikti serta dengan Kementerian agama untuk melakukan perlawanan terhadap penyebaran paham radikal.

Selain melaksanakan fungsi sebagai badan koordinasi, BNPT juga membentuk berbagai satgas sebagai salah satu bentuk

pelaksanaan tugas sesuai dengan undang-undang, dimana salah satunya adalah satgas pencegahan dalam upaya penanggulangan perkembangan radikalisme di Indonesia.

Pergerakan kelompok radikal yang saat ini terjadi di Indonesia, dapat dilihat sebagai sebuah bentuk peperangan ireguler antara pemerintah Indonesia dengan pihak kelompok radikal dimana jika mengacu kepada konsep dari peperangan ireguler itu sendiri, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh terhadap populasi yang relevan atau dalam hal ini adalah masyarakat. Propaganda merupakan salah satu alat perang yang digunakan oleh kelompok radikal dalam mencapai tujuan penyebaran paham yang mereka yakini dan untuk mendapatkan legitimasi atas berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

Mengacu kepada teori propaganda dari Soelhi yang membagi propaganda menjadi 3 tipe yaitu propaganda putih, propaganda kelabu, dan propaganda hitam, maka bentuk propaganda dari kelompok radikal dapat dikategorikan dalam tipe propaganda kelabu dan propaganda hitam dimana tujuan dari propaganda kelabu dan hitam pada dasarnya adalah untuk mengacaukan pikiran orang lain dengan menyebarkan informasi palsu untuk menggertak dan mengadu domba pihak lawan. Propaganda digunakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan hati serta pikiran dari target yang menjadi sasaran dimana dalam hal ini adalah masyarakat. Yang perlu menjadi perhatian oleh pihak pemerintah terutama BNPT selaku *leading sector* dalam penanggulangan terorisme termasuk radikalisme adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok radikal termasuk di dalamnya yang berupa propaganda, sesuai dengan teori dari Clancy, akan dilaksanakan secara berkesinambungan (*sustainable*), guna mendapatkan keabsahan (*legitimacy*), dan dalam rangkaian kegiatan yang bersifat stabil (*stability*). Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang menentukan kemenangan dalam sebuah peperangan ireguler dimana kemenangan akan berada pada pihak yang memiliki kendali dan pengaruh atas hati dan pikiran (*heart and mind*) dari masyarakat.

Hal penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh BNPT adalah konten yang digunakan dalam pelaksanaan kontra propaganda. Konten yang berisikan wawasan

perdamaian dan kebangsaan belum menyentuh berbagai faktor penyebab dan pencetus dari munculnya radikalisme itu sendiri mengingat berbagai *issue* terkait bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya akan selalu digunakan oleh pihak kelompok radikal sebagai bahan propaganda mereka dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Identifikasi dari beberapa faktor pencetus radikalisme tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teori dimana salah satunya adalah teori dari Veda hadiz. Teori dari Veda Hadiz menyatakan bahwa secara khusus di Indonesia, perkembangan radikalisme adalah merupakan hasil dari benturan kelas antara *subordinated class* dengan *ruling class* yang terjadi selama orde baru. Beberapa *issue* tersebut adalah :

- Kesenjangan sosial politik (benturan kelas di dalam masyarakat).
- Sikap pemerintah terhadap berbagai *issue* yang terkait dengan agama Islam.
- Kebijakan pemerintah terkait kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta program pengentasan kemiskinan.
- Kebijakan penyelesaian konflik sosial yang terkait dengan agama.
- Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran terutama ayat terkait *qital* (perang).
- Intoleransi terhadap keberagaman agama sejak dini (usia sekolah).

Guna menganalisa kontra propaganda yang digunakan oleh BNPT terutama dari jajaran Sub Direktorat Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan digunakan pendekatan teori yang disampaikan oleh Mintzberg, dimana dalam menilai sebuah strategi itu sekurang-kurangnya perlu dilihat dalam 5 pengertian yang saling terkait yaitu:

- a. Strategi sebagai sebuah perencanaan (*Plan*) untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.

- b. Strategi sebagai acuan taktik (*Ploy*) yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Strategi sebagai penilaian pola (*Pattern*) /sudut pandang yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d. Strategi sebagai sebuah posisi (*Position*) yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Strategi sebagai perspektif (*Perspective*) dalam mengambil rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Selain itu, analisa terhadap kontra propaganda BNPT, juga dilihat dari perpektif ilmu komunikasi dimana pada dasarnya propaganda adalah sebuah bentuk komunikasi yang pada akhirnya bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat diterima oleh target audiens. Dalam teori yang dikemukakan oleh Hafied Cangara, tujuan dalam sebuah komunikasi adalah :

- a. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti
- b. Memahami apa yang diinginkan oleh orang
- c. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu

Unsur-unsur komunikasi juga merupakan faktor penting yang digunakan dalam menganalisa berbagai unsur yang ada di dalam kontrapropaganda dari BNPT dimana unsur-unsur tersebut meliputi sumber, pesan, media, penerima, dan efek yang ditimbulkan (hal ini juga selaras dengan model komunikasi dari Harold D. Lasswell (1948) yang menyatakan *Who, Says What, in which channel, to whom, and with what effect*).

Mengingat strategi kontra propaganda yang dilaksanakan bertujuan untuk menanggulangi perkembangan radikalisme yang saat ini berlangsung di Indonesia, maka perlu dipahami pula berbagai faktor yang menjadi penyebab dan pemicu berkembangnya paham tersebut di Indonesia guna mengidentifikasi berbagai *issue* yang dijadikan alasan oleh pihak kelompok radikal dalam upaya melegitimasi gerakannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kontra propaganda yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki tujuan (*Ends*) untuk mengidentifikasi pola penyebaran propaganda kelompok radikal, mencegah penyebaran propaganda radikal di tengah masyarakat, serta meningkatkan *awareness* masyarakat agar mampu menangkal dan melawan propaganda dari kelompok radikal.

Berbagai sarana prasarana (*Means*) berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat *online* maupun *offline*, digunakan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan berbagai berita positif guna mempengaruhi masyarakat agar tidak terpengaruh berbagai bentuk ajakan yang dipropagandakan oleh pihak kelompok radikal. Keterpaduan penggunaan sarana perangkat yang ada dalam rangka deteksi dini dan pencegahan terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia dapat terlaksana dengan baik melalui kerjasama lintas sektoral yang terjalin selama ini terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam pelaksanaan kontra propaganda (*Ways*), BNPT menggunakan dua metode, yaitu metode *online* dan metode *offline*. Konten yang utama dalam strategi kontra propaganda Pusat Media Damai adalah berupa penyebaran wawasan perdamaian dan kebangsaan terutama melalui metode *online* (sesuai dengan jenis media yang digunakan oleh kelompok radikal pada saat ini).

## Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan sebagai bahan masukan. Yaitu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya Sub Direktorat Kontra Propaganda agar menggunakan berbagai *issue* yang telah teridentifikasi sebagai faktor-faktor pemicu dalam perkembangan radikalisme

kontemporer di Indonesia sebagai bahan konten dari kontra propaganda yang dilaksanakan.

Adapun beberapa *issue* tersebut terkait kesenjangan sosial politik (benturan kelas di dalam masyarakat), sikap pemerintah terhadap berbagai *issue* yang terkait dengan agama Islam, kebijakan pemerintah terkait kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta program pengentasan kemiskinan, kebijakan penyelesaian konflik sosial yang terkait dengan agama, penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran terutama ayat terkait *qital* (perang), intoleransi keberagaman agama sejak dini (usia sekolah).

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pihak akademisi terutama dari Universitas Pertahanan terkait sinergitas lintas sektoral pada jajaran kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan tugas BNPT sesuai keputusan Menkopolhukam No. 42 tahun 2018 tentang Koordinasi antar Kementerian/ Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Terorisme dengan pendekatan kualitatif keorganisasian, kebijakan dan strategi organisasi dengan tujuan agar dapat diketahui lebih dalam tentang efektivitas kerjasama yang telah berjalan.

#### Daftar Pustaka

- Agus, SB. 2014. *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Daulat Press
- Agustini. 2013. *Penegelolaan dan Unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Pusaka
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta
- Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantittative Approach*. London: Sage Publications.
- Ginting Munthe, Moeryanto, *Propaganda dan Ilmu Komunikasi*, Jurnal IISIP, Vol. IV, No. 1, Edisi Juni 2012
- George, Terry dan Leslie W. Rue. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hadiz, Vedi R. 2009. *Islamic Populism and Political Transition in Post-Soeharto Indonesia*, disampaikan pada Seminar Internasional tentang Transisi Politik di Indonesia. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Miles, Matthew B. 2014, *Qualitative Data Analysis, California, SAGE*
- Mintzberg, Henry, James Brian Quinn, dan Jhon Voyer. 1995. *"The Strategy Process"*. London: Prentice Hall International, Inc.,
- Nurudin. 2008. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Palan, R. 2007. *Competency Management A Practioner's Guide*. Kuala Lumpur: Lumpur SMR Publishing
- Ridwan, Habib. 2014. *Thesis-Efektivitas Metode Penggalangan Intelejen Terhadap Mantan Narapidana Kasus Terorisme*. Universitas Indonesia
- Soelhi, Mohammad. 2012. *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Reakatama Media
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01 / K.BNPT/I/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2 dan 3
- Pusat Media Damai Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme Tahun  
2017

[teror-indonesia-2016](#) dikutip Tanggal  
6/02/2018

Kementrian Komunikasi dan Informatika:  
Peran Kementrian Komunikasi dan  
Informatika Dalam Penanganan  
Konten Radikalisme dan Terorisme.  
Pada acara Symposium Penanganan  
Radikalisme dan Terorisme di  
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian  
(PTIK), Jakarta 6 Juli 2018.

[https://republika.co.id/hasil-reset-soal-agama-  
dan-negara-di-indonesia](https://republika.co.id/hasil-reset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia). Dikutip  
Tanggal 25 Maret 2018

[https://kumparan.com/@kumparannews/rentet  
an-bom-bunuh-diri-di-indonesia](https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia)  
diakses pada tanggal 6/02/2018

[https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-  
fakta/156900-daftar-aksi-rencana-](https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-)

### **PROFIL SINGKAT**

\* Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam.  
lahir di Jakarta, 1 Februari 1976. Penulis adalah  
perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris  
Besar Polisi (AKBP) menamatkan Sekolah  
Pimpinan Menengah (Sespimmen) serta  
alumnus magister pada Program Studi  
Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan  
Bogor tahun 2018.

\*\*Khoirul Hasan, lahir pada 17 Oktober  
1991 merupakan lulusan magister pada  
Program Studi Damai dan Resolusi Konflik  
Universitas Pertahanan Bogor tahun 2018.